



RENSTRA 2018-2023

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) harus menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima (5) tahun, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja .

Penyusunan Renstra Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2018-2023, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Tahapan Persiapan Penyusunan Renstra, dengan kegiatan-kegiatan Pembentukan Tim Penyusun Renstra PD, Orientasi mengenai Renstra PD, Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD dan penyiapan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan kepada

- Sistem Informasi Pembangunan Daerah,
- b. Tahapan Penyusunan Rancangan Awal
 - c. Tahapan Penyusunan Rancangan
 - d. Tahapan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
 - e. Perumusan Rancangan Akhir dan
 - f. Penetapan.

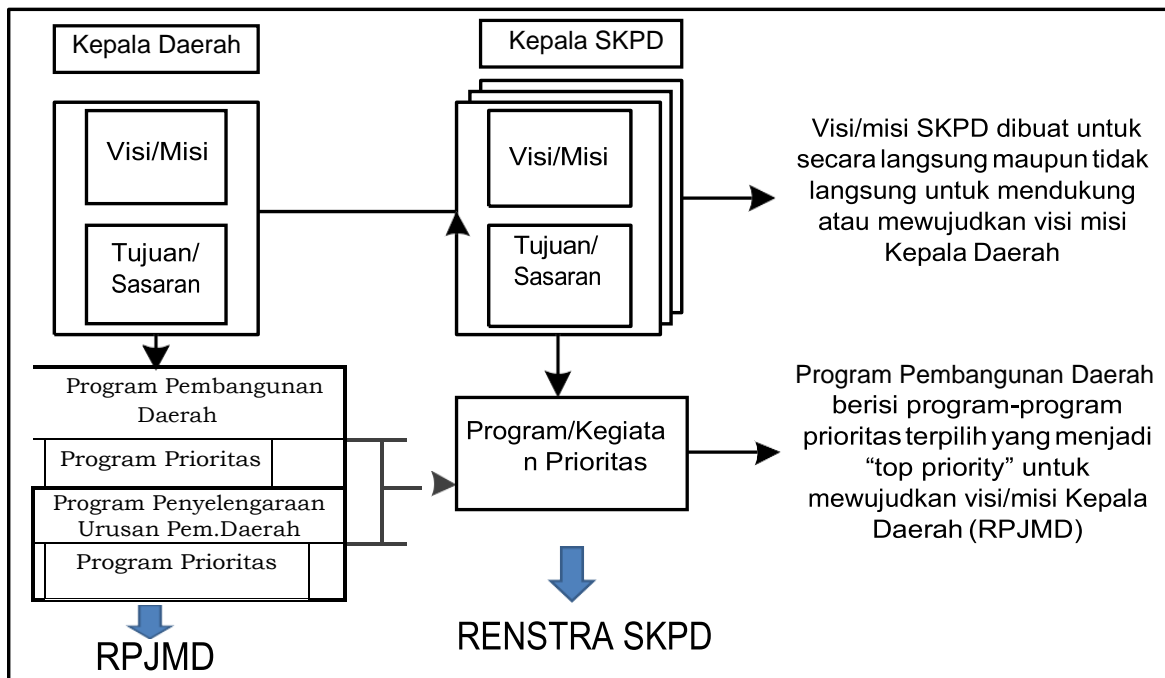
Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Bojongloa Kidul selaku kepala Perangkat Daerah , serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappelitbang Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Visi Perangkat Daerah merupakan keadaan yang ingin diwujudkan Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD.

Renstra Kecamatan Bojongloa Kidul disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kota Bandung Tahun 2018–2023 yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Walikota Bandung yaitu Mewujudkan Kota Bandung Sebagai Kota Bermartabat 2025, yang dapat dilihat dari gambar sebagai berikut :

Gambar 1-1
Keterkaitan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah



1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renstra Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah:

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Derah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
8. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018 – 2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung tahun 2018–2023 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi , tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Kelurahan di lingkungan Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dalam menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2018-2023 yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Bandung, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung Tahun 2018-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 8 (delapan) bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL

Gambaran Pelayanan Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan : (1) Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, (2) Telaah Visi, Misi dan Program dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (3) Telaah Renstra Kecamatan Bojongloa Kidul dan Renstra Provinsi (4) Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan (5) Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah dari Kecamatan Bojongloa Kidul.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan

pembangunan Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam Bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja perangkat daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bandung

BAB VIII PENUTUP



RENSTRA 2018-2023

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL

Pemerintah Kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena merupakan ujung tombak keberhasilan tugas Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kecamatan juga berperan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Kecamatan yang mampu memberikan pelayanan terbaik serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Sebagai upaya untuk memperkuat Pemerintahan Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Bupati/Walikota dan untuk Kota Bandung telah dikeluarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah, yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) bidang urusan 124 (seratus dua puluh empat) rincian urusan.

Melalui urusan tersebut, Kecamatan Bojongloa Kidul berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi sebagai dasar dalam menyusun berbagai kebijakan Kota Bandung yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah sehingga dapat mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Konsekwensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Walikota Bandung yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Gambaran umum Pelayanan Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung merupakan deskripsi dari kondisi mengenai Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung yang mencakup 4 (empat) aspek sebagai berikut:

- (i) tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Bojongloa Kidul;
- (ii) sumber daya Kecamatan Bojongloa Kidul;
- (iii) kinerja pelayanan Kecamatan Bojongloa Kidul; dan
- (iv) tantangan dan peluang pengembangan .

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bojongloa Kidul

2.1.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan Bojongloa Kidul

Camat Bojongloa Kidul mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota Bandung untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di wilayah Kecamatan Bojongloa Kidul. Tugas dan Fungsi Kecamatan Bojongloa Kidul tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Keputusan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016.

Adapun rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kecamatan;
- f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan

oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan

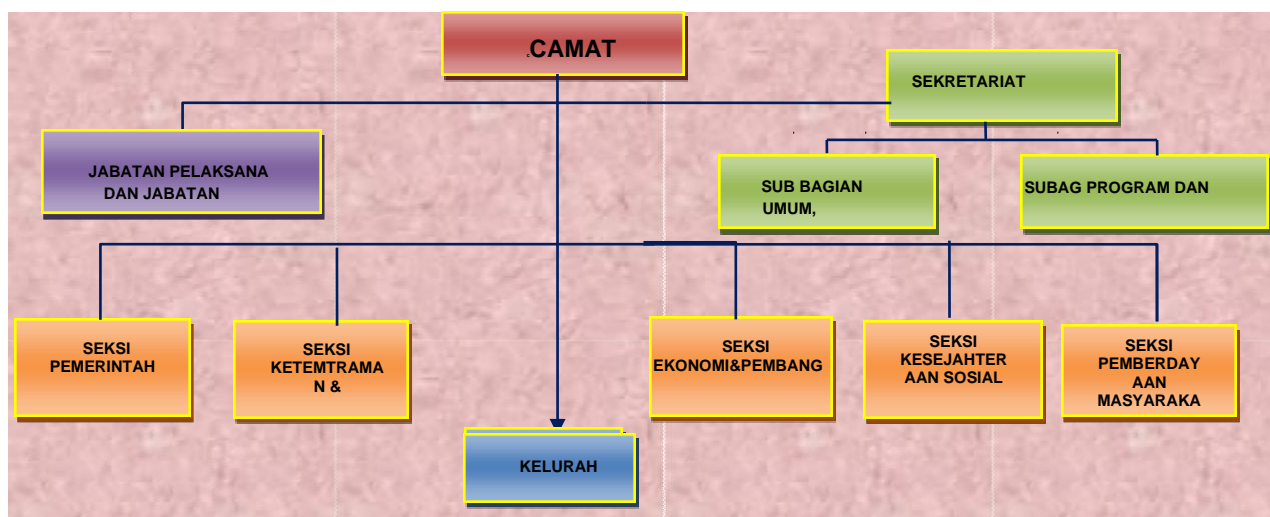
2.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Bojongloa Kidul

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung maka Susunan Organisasi Kecamatan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, terdiri dari:
 - b.1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi;
 - b.2. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan;
- f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- g. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- h. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- i. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan



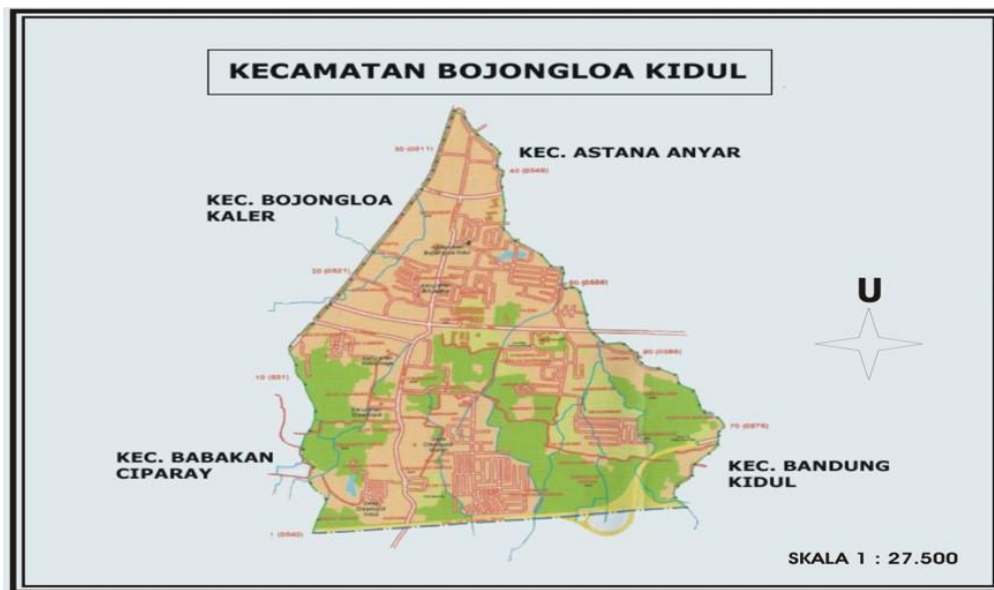
Sumber: Perda Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016

Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dilihat dari perspektif geografis merupakan bagian dari pusat perkotaan sebelah timur Kota Bandung yang memiliki luas wilayah ± 590,75 Ha., dengan batasan wilayah meliputi:

Sebelah Timur Laut : Kecamatan Astana Anyar
Sebelah Tenggara : Kecamatan Bandung Kidul
Sebelah Barat daya : Kecamatan Babakan Ciparay
Sebelah Barat laut : Kecamatan Bojongloa Kaler

Gambar 2.2

PETA WILAYAH KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL



Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kecamatan Bojongloa Kidul dibagi dalam 6 Kelurahan, 44 RW dan 261 RT dengan rincian per kelurahan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Kelurahan, RW dan RT di Kecamatan Bojongloa
Kidul

DATA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL

| NO | KELURAHAN | RW | PKK | LPM | KARTA | JUMLAH |
|---------------|----------------------------|-----------|------------|------------|--------------|---------------|
| 1 | SITUSAEUR | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 2 | KEBONLEGA | 11 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 3 | CIBADUYUT WETAN | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | CIBADUYUT KIDUL | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 5 | CIBADUYUT | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 6 | MEKARWANGI | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| JUMLAH | | 44 | 6 | 6 | 6 | 62 |

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Bojongloa Kidul Tahun 2018

Adapun Jumlah Penduduk Kecamatan Bojongloa Kidul per bulan November 2018, tercatat sebanyak 76.938 jiwa, yang terdiri dari 39.471 jiwa laki-laki dan 37.467 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Bojongloa Kidul saat ini sebanyak 21.124 KK.

Bila dilihat dari segi kepadatan penduduk, dapat dihitung bahwa kepadatan di Kecamatan Bojongloa Kidul mencapai nilai 202 jiwa per hektar dan dilihat dari pertumbuhan penduduk, intensitas populasinya akan terus bertambah dari waktu ke waktu, untuk posisi akhir November 2018 jumlah penduduk berdasarkan usia dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk berdasarkan
Usia Kecamatan Bojongloa Kidul

| No | Umur | Jumlah | | |
|----|------------------|--------|------|-------------|
| | | L | P | Jumlah |
| 1 | 0 – 4 tahun | 4296 | 4113 | 8409 |
| 2 | 5 – 9 tahun | 3499 | 3045 | 6544 |
| 3 | 10 – 14 tahun | 3463 | 3205 | 6668 |
| 4 | 15 – 19 tahun | 3341 | 3230 | 6571 |
| 5 | 20 – 24 tahun | 3448 | 3284 | 6732 |
| 6 | 25 – 29 tahun | 3512 | 3405 | 6917 |
| 7 | 30 – 34 tahun | 3540 | 3386 | 6926 |
| 8 | 35 – 39 tahun | 3051 | 3000 | 6051 |
| 9 | 40 – 44 tahun | 2621 | 2578 | 5199 |
| 10 | 45 – 49 tahun | 2502 | 2389 | 4891 |
| 11 | 50 – 54 tahun | 1935 | 1796 | 3731 |

| No | Umur | Jumlah | | |
|--------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | L | P | Jumlah |
| 1 2 | 55 – 59 tahun | 1796 | 1666 | 3462 |
| 1 3 | 60 – 64 tahun | 1323 | 1251 | 2574 |
| 1 4 | 65 – keatas | 1144 | 1119 | 2263 |
| | Jumlah | 39471 | 37467 | 76938 |

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Bojongloa Kidul Bulan November 2018

Sedangkan berdasarkan Tingkat Pendidikan, sebaran pendidikan penduduk di Kecamatan Bojongloa Kidul dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk berdasarkan
Pendidikan Kecamatan Bojongloa Kidul

| No | Pendidikan | Jumlah | | |
|----|----------------------------|--------|------|--------------|
| | | L | P | Jumlah |
| 1 | Tidak/Belum Sekolah | 5645 | 5543 | 11188 |
| 2 | Tidak Tamat SD | 1687 | 1523 | 3210 |
| 3 | Belum Tamat SD | 5147 | 5076 | 10223 |
| 4 | Tamat SD | 8902 | 8969 | 17871 |
| 5 | SLTP | 7511 | 7317 | 14828 |
| 6 | SLTA | 7306 | 6432 | 13738 |
| 7 | Akademi/Sarjana Muda | 1703 | 1476 | 3179 |
| 8 | Sarjana/Pascasarjana/lain2 | 1592 | 1142 | 2734 |

Sumber : Kasie Pemerintahan Kecamatan Bojongloa Kidul Bulan November 2018

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk berdasarkan Tenaga
Kerja Kecamatan Bojongloa Kidul

| No | Pekerjaan | Jumlah | | |
|----|----------------|--------|-------|-------------|
| | | L | P | Jumlah |
| 1 | Pegawai Negeri | 1501 | 966 | 2467 |
| 2 | TNI/POLRI | 243 | 19 | 262 |
| 3 | Pegawai swasta | 9197 | 768 | 1688 |
| | | | 5 | 2 |
| 4 | Petani | 183 | 62 | 245 |
| 5 | Pedagang | 6676 | 492 | 1160 |
| | | | 4 | 0 |
| 6 | Pelajar | 7679 | 7168 | 1484 |
| | | | | 7 |
| 7 | Mahasiswa | 2372 | 200 | 4378 |
| | | | 6 | |
| 8. | Pensiunan | 662 | 463 | 1125 |
| 9 | Lain-lain | 1098 | 14185 | 2416 |
| | | 0 | | 5 |
| | JUMLAH | 3949 | 37478 | 7697 |
| | | 3 | | 1 |

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, Camat Bojongloa Kidul dibantu oleh 62 pegawai yang tersebar di Kecamatan dan 6 Kelurahan di Wilayah Bojongloa Kidul. Pada tanggal 31 Desember 2018, terdapat kekosongan 3 Pejabat Struktural Eselon IVa, dikarenakan pensiun selama periode tahun 2018 yaitu untuk jabatan Kasie

Pemerintahan Kecamatan Bojongloa Kidul, Lurah Cibaduyut Wetan dan Lurah Kebon Lega. Adapun komposisi pegawai di Kecamatan Bojongloa Kidul dapat terlihat dalam tabel komposisi pegawai berdasarkan eselon berikut ini

Tabel 2.5

Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan
Kecamatan Bojongloa Kidul

| No | Uraian | Eselon IIIa | Eselon IIIb | Eselon IVa | Eselon IVb | Staf | Jumlah |
|----|---------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1 | Kecamatan Bojongloa Kidul | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 21 |
| 2 | Kelurahan Cibaduyut | - | - | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 3 | Kelurahan Cibaduyut Wetan | - | - | - | 4 | 3 | 7 |
| 4 | Kelurahan Cibaduyut Kidul | - | - | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 5 | Kelurahan Kebon Lega | - | - | - | 3 | 3 | 6 |
| 6 | Kelurahan Situsaeur | - | - | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 7 | Kelurahan Mekarwangi | - | - | 1 | 4 | 2 | 7 |
| | JUMLAH | 1 | 1 | 8 | 24 | 26 | 60 |

Sumber: Kecamatan Bojongloa Kidul Tahun 2018

Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, sebanyak 9 orang memiliki pendidikan S2, sebanyak 21 orang yang memiliki pendidikan S1, sebanyak 2 orang yang memiliki pendidikan D3 dan sebanyak 28 orang (28,30%) yang memiliki pendidikan SLTA. Uraian diatas dapat kita lihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Tingkat
Pendidikan Kecamatan Bojongloa Kidul

| No | Uraian | S3 | S2 | S1 | D3 | SLTA | SLTP | SD | Jml |
|----|---------------------------|----|----------|-----------|----------|-----------|------|----|-----------|
| 1 | Kecamatan Bojongloa Kidul | - | 6 | 7 | 2 | 6 | - | - | 21 |
| 2 | Kelurahan Cibaduyut | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 5 |
| 3 | Kelurahan Cibaduyut Wetan | - | 1 | 3 | - | 4 | - | - | 8 |
| No | Uraian | S3 | S2 | S1 | D3 | SLTA | SLTP | SD | Jml |
| 4 | Kelurahan Cibaduyut Kidul | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 6 |
| 5 | Kelurahan Kebon Lega | - | - | 4 | - | 3 | - | - | 7 |
| 6 | Kelurahan Situsaeur | - | 1 | 1 | - | 6 | - | - | 8 |
| 7 | Kelurahan Mekarwangi | - | - | 2 | - | 5 | - | - | 7 |
| | JUMLAH | - | 9 | 21 | 2 | 28 | - | - | 62 |

Sumber: Kecamatan Bojongloa Kidul Tahun 2018

2.2.2 Sarana Dan Prasarana Kerja

Tersedianya sarana dan prasarana akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung. Secara umum sarana dan prasarana terbagi dalam berbagai bidang terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7

Bidang Kesehatan pada Kecamatan Bojongloa Kidul

| No | Prasarana | Jumlah |
|----|-------------------------|--------|
| 1 | Rumah Sakit | 1 |
| 2 | Dokter Umum | 4 |
| 3 | Bidan | 8 |
| 4 | Dokter Gigi | 5 |
| 5 | Puskesmas | 3 |
| 6 | Klinik/Balai Pengobatan | 8 |
| 7 | Apotik | 5 |
| 8 | Posyandu | 54 |

Sumber: Kecamatan Bojongloa Kidul Tahun 2018

Tabel 2.8

Bidang Olah Raga Kecamatan Bojongloa Kidul

| No | Lapangan | Jumlah |
|----|-------------|--------|
| 1 | Sepak Bola | 1 |
| 2 | Bulutangkis | 12 |
| 3 | Tenis Meja | 2 |
| 4 | Futsal | 3 |
| 5 | Senam | 2 |
| 6 | Bela Diri | 1 |

Sumber: Kecamatan Bojongloa Kidul Tahun 2018

Tabel 2.9

Bidang Ekonomi Kecamatan Bojongloa Kidul

| No | Uraian | Jumlah |
|----|--------------------|--------|
| 1 | Koperasi | 11 |
| 2 | UKM | 488 |
| 3 | Pasar Selapan/Umum | 1 |
| 4 | Toko/Swalayan | 22 |
| 5 | Rumah Makan | 53 |
| 6 | Pedagang kaki Lima | 914 |
| 7 | Bank | 6 |
| 8 | UMKM | 1163 |
| 9 | Home Industri | 376 |
| 10 | Hotel | 3 |

Sumber: Kecamatan Bojongloa Kidul Tahun 2018

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bojongloa Kidul

UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Walikota/Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 185 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah. Dengan begitu Kecamatan Bojongloa Kidul dapat melaksanakan pelayanan secara maksimal kepada Masyarakat. Adapun gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Bojongloa Kidul dalam renstra tahun 2013-2018 berdasarkan indikator kinerja pelayanan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dapat disajikan pada table T-sebagai berikut:

Tabel 2.10
Pecapaian Kinerja Pelayanan
Kecamatan Bojongloa Kidul Kota
Bandung

| No | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan | Target NSPK | Target IKK | Target Renstra OPD Tahun ke- | | | | | Realiasi Capaian Tahun ke - | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|----------|--|---|-------------|------------|------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| A | Program Peran Kecamatan dan Kelurahan | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Fasilitasi Peningkatan perekonomian Kecamatan dan Kelurahan | Terfasilitasinya kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan dan kelurahan | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94.73 | 96.42 | 91,39 | 96,43 | 52,92 | 0.94 | 0.96 | 0,91 | 0.96 | 0,53 |
| 2 | Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan | Terfasilitasinya kegiatan peningkatan kualitas kehidupan kemasyarakatan | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.21 | 96,92 | 97,47 | 97,31 | - | 0.99 | 0.96 | 0.97 | 0,97 | - |
| 3 | Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Terfasilitasinya Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat kecamatan dan kelurahan | - | - | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.06 | 97.54 | 99,31 | 99,56 | 97,53 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0,99 | 0,98 |
| 4 | Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan | Terfasilitasinya kegiatan peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95.18 | 98.63 | 99.04 | 99,99 | 95,46 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0,99 | 0,95 |

| No | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan | Target NSPK | Target IKK | Target Renstra OPD Tahun ke- | | | | | Realiasi Capaian Tahun ke - | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|----|--|---|-------------|------------|------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | ketertiban tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan | Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pemerintahan umum Kecamatan dan Kelurahan | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,77 | 95,56 | 98,83 | 99,83 | 96,79 | 0,99 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 0,97 |
| 6 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat | Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan dan Kelurahan | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98,87 | 92,69 | 96,82 | 98,88 | 84,14 | 0,98 | 0,92 | 0,96 | 0,99 | 0,84 |
| 7 | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat | Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat | - | - | - | - | - | 100 | 100 | N/A | N/A | N/A | 99,35 | 89,39 | - | - | - | 0,99 | 0,89 |
| 8 | Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan | Terfasilitasinya Kegiatan Kualitas Kehidupan Masyarakat | - | - | - | - | - | - | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 96,67 | - | - | - | - | 0,97 |

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | |
|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|------|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan | 88.907.000 | 93.070.000 | 108.848.000 | 129,273,200 | 82.093.200 | 84.232.000 | 86.964.500 | 99.485.000 | 124,653,450 | 43.447450 | 0,95 | 0,93 | 0,92 | 0,96 | 0,52 |
| Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan | 1.053.850.000 | 643.092.000 | 899.205.000 | 1,233,998,143 | - | 1.045.526.800 | 623.318,750 | 876.459.450 | 1,200,749,820 | - | 0,99 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | - |
| Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 1.271.862.550 | 1,797,952.220 | 3.025,850.129 | 4,451,164,258 | 3.700.945.622 | 1.259.853.530 | 1.797.952.220 | 3.004.909.110 | 4,431,405,012 | 3.609.671.875 | 0,98 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,97 |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | |
|--|-------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---|------|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 411.000.000 | 389564000 | 392,845,000 | 971,256,000 | 1.483.007.880 | 391.218.100 | 384.247,500 | 389.975.000 | 971,223,000 | 1.415.639.960 | 0.89 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0,96 |
| Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan | 1.865.660.000 | 43.875.000 | 2.975.208.000 | 3,139,143,800 | 3.158.357.300 | 1.861.337.950 | 40.670.000 | 2.937,380.500 | 3,133,793,850 | 3.056.858.900 | 0.99 | 0.93 | 0.98 | 0.99 | 0,97 |
| Fasilitasi Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat | 88.215.000 | 205.239.250 | 193.213.000 | 34,600,100 | 8.623.000 | 86.615.500 | 196.137.500 | 187.078.350 | 34,211,220 | 7.255.650 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.84 |
| Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat | - | - | - | - | 354.704.832 | - | - | - | - | 317.0561.00 | - | - | - | - | 0,88 |
| Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan | - | - | - | - | 818.564.600 | - | - | - | - | 791.335.250 | - | - | - | - | 0,97 |

Dari table diatas dapat kita mengambil kesimpulan dari data hasil pelayanan kinerja pelayanan Kecamatan Bojongloa kidul yang telah dilaksanakan dan maksimal selama kurun waktu renstra 2013-2018 ada 3 kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Perekonomian Masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi Kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat seperti pembinaan UKM dan Koperasi dan pembinaan/sosialisasi peluang usaha dimana hasil belum maksimal sesuai target yang telah ditetapkan
2. Pelayanan Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat seperti Potisasi, Kegiatan Pengadaan Bibit tanaman, di wilayah kecamatan Bojongloa Kidul dan sebagainya.
3. Pelayanan Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban dengan Pembinaan dan Pelatihan Linmas, Pembentukan SATWANKAR diwilayah Kecamatan Panyileukan dan sebagainya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Sesuai dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Bojongloa Kidul mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

- 1) Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja;
- 2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
- 3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
- 4) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

- 5) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan;
- 6) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- 7) Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Bojongloa Kidul harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- 8) Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
- 9) Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.



RENSTRA 2018-2023

BAB 3

PERMASALAHAN ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL

Bab ini menguraikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan- permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kota yang merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan lain serta mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan berdasarkan evaluasi capaian kinerja RPJMD Tahun 2013-2018, berdasarkan evaluasi

capaian kinerja bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan mengenai berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka permasalahan-permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan, dapat diuraikan berikut ini.

1. Berdasarkan survey kepuasan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Bojongloa Kidul pada rata-rata Kecamatan dan Kelurahan tahun 2017, dari target sebesar 83,00 terealisasi sebesar 86,50, dimana semua unit kerja mencapai target yang telah ditentukan. Meskipun demikian standar pelayanan publik di Kecamatan Bojongloa Kidul perlu dilakukan reviu dalam rangka perbaikan berkelanjutan, mengingat standar yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI masih berorientasi pada pemenuhan atau dimensi tangible. Permasalahan lainnya yang dirasakan oleh masyarakat adalah ketidaktepatan mekanisme, waktu, dan biaya layanan. Hal ini memerlukan perbaikan secara berkesinambungan.

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung dimana Kecamatan Bojongloa Kidul merupakan salah satu SKPD di dalamnya.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:

- a) Ruang pelayanan yang belum memadai terutama di Kecamatan Bojongloa Kidul dimana gedung kantor dapat dianggap tidak layak karena telah banyak kerusakan
- b) Ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebesar 80%;
- c) Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
- d) Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD;
- e) Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
- f) Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan;
- g) Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;
- h) Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap PBJ (metode swakelola.
- i) Masih rendahnya tingkat partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan kewilayahan.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Bojongloa Kidul, sebagai berikut

- a) Sumber Daya Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan masih mengandalkan Non ASN;
- b) Masih belum optimalnya pelaporan Program dan Kegiatan Kecamatan dan Kelurahan kepada Pemerintah Kota Bandung;
- c) Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan.
- d) Kurangnya partisipasi ASN dalam membuat rencana strategis Kecamatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Bojongloa Kidul sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang kewenangannya dilimpahkan sebagian oleh Walikota adalah faktor internal dan eksternal

Kecamatan Bojongloa Kidul, **masalah internal** yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung antara lain :

- a) Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja, ditandai dengan adanya kekosongan pejabat structural baik di kecamatan maupun kelurahan serta adanya kelurahan yang tidak mempunyai staf pelaksana;
- b) Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
- c) Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
- d) Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah **eksternal** yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung adalah:

- a) Adanya multi interpretasi terhadap perencanaan keuangan terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang masih pemanfaatannya rutinitas, hal ini disebabkan aturan PIPPK belum secara spesifikasi;
- b) outcome dari program pemberdayaan masyarakat masih menunjukkan hasil yang belum optimal;
- c) Banyak kegiatan yang belum didukung oleh anggaran yang memadai;
- d) Belum adanya koordinasi vertikal yang baik dengan satuan kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- e) Masalah utama yang dihadapi Kota Bandung adalah tidak dimilikinya fasilitas Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS). TPPAS yang digunakan saat ini merupakan TPA yang bersifat sementara dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan usia pakainya akan segera berakhir. Dengan pola pengelolaan sampah Kota Bandung yang masih bertumpu pada pola Kumpul – Angkut – Buang, maka permasalahan TPA ini akan menjadi masalah besar di

kemudian hari apabila tidak segera diantisipasi. Karenanya, perubahan pola pengelolaan mutlak diperlukan, diantaranya dengan mengintensifkan pola pengelolaan sampah secara 3R (Reduce, Reuse dan Recycle);

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dalam kurun waktu 2018-2023, adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Barang

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai „pelayan masyarakat“. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam

penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entrepreneurial management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget).

Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

- a. Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan;
- b. Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
- c. Pengamanan barang daerah;
- d. Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

32 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin

dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023, yaitu:

**“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG
YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN
AGAMIS”**

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bandung** : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang,
- Unggul** : Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik di setiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.
- Nyaman** : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan

ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan,

Sejahtera : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Agamis : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan

Dengan demikian visi Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis bermakna “Layanan dasar yang unggul dalam hal

birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur, dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing

Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani

Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima

3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan

Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal

4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur

dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan

5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta

Strategi yang akan menjadi panduan Pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan dengan memformulasikan *short term outcome* untuk strategi. Melalui penerapan instrumen ini dapat dilihat kehandalan suatu program untuk mewujudkan sasaran daerah yang telah direncanakan dengan perumusan strategi berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan logic model.

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran, dan Strategi Setiap Misi

| Tujuan | Sasaran | Strategi |
|--|--|---|
| Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih | | |
| Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien | Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur |
| | | Meningkatkan integritas aparatur sebagai pelayan masyarakat |
| | | Meningkatkan kapasitas manajemen pengawasan |
| | | Penguatan kelembagaan tepat ukuran dan tepat fungsi |
| | | Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan |
| | | Meningkatkan kinerja |

| | | |
|--|--|--|
| | | instansi pemerintah |
| | | Meningkatkan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien |
| | | Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas |
| Misi 5 : Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi | | |
| Optimalisasi Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan | Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan | Mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam berpartisipasi dan berkolaborasi pada pembangunan kota |
| | Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan | Mengembangkan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang melalui kerjasama daerah (antara lain, pengelolaan TJSL/TJSL, kerjasama pemerintah daerah dengan pihak lain, pembiayaan infrastruktur non anggaran pemerintah, dan lain-lain |

33 Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Propinsi Jawa Barat

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah "Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya

Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”.

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yaitu Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan melalui strategi :

- a. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;
- b. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi;
- d. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar;
- e. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.

Terhadap Renstra kementerian Dalam Negeri, Renstra Kecamatan Panyileukan tidak terdapat keterkaitan secara langsung, dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan Panyileukan adalah mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Bandung, dan merupakan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kota Ke Kecamatan Panyileukan

3.3.2 Penelaahan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Tema Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2020-2024 adalah:

**“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi
Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”**

1. Berpenghasilan menengah –tinggi dapat diwujudkan dengan:
 - Transformasi struktural berjalan
 - Produktifitas tenaga kerja meningkat
 - Iklim investasi kondusif
 - GNI per kapita USD 3.896 – USD 12.055
2. Sejahtera dapat diwujudkan dengan:

- Kualitas hidup meningkat
 - Perilaku disiplin dan beradab
 - SDM berkualitas dan berdaya saing
 - Indeks kebahagiaan meningkat
3. Adil dapat diwujudkan dengan:
- Ketimpangan menurun
 - Redistribusi berjalan baik
4. Berkesinambungan dapat diwujudkan dengan:
- Memperhatikan daya dukung dan daya tampung (Low Carbon Development)
 - Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional
- Arah kebijakan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024, adalah:

1. Pembangunan manusia
 - a. Pelayanan dasar dan perlindungan sosial
 - b. SDM berkualitas dan berdaya saing
2. Pembangunan ekonomi
 - a. Pangan dan pertanian
 - b. Energi, mineral, dan pertambangan
 - c. Kelautan dan kemaritiman
 - d. Pariwisata
 - e. Ekonomi kreatif dan digital
 - f. Industri manufaktur
3. Pembangunan infrastruktur
4. Pembangunan politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan
5. Pembangunan kewilayahan

Adapun isu strategis Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia:
 - Pelayanan Dasar
 - SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Pembangunan ekonomi:
 - Panga
 - Energ
 - Pariwisata, ekonomi Kreatif dan Digital

Industri Manufaktur Kelautan dan
Kemaritiman

3. Pembangunan kewilayahan:
 - Sentra Pertumbuhan
 - Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan
4. Pembangunan Infrastruktur:
 - Transportasi
 - Telekomunikasi
 - Sumber Daya Air Perumahan dan Pemukiman
5. Pembangunan Polhukkamhan:
 - Hukum dan Regulasi
 - Hanka
 - Politik

Penelaahan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat

Penelaahan terhadap Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi.

Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, adalah:

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan
Inovasi dan Kolaborasi”

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

Jabar Juara Lahir Batin : pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan dan kualitas hidup masyarakat

baik lahir maupun batin.

Inovasi : pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sector dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi : perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan **beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023**, yaitu :

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat 2018-2023, meliputi:

“Reliuis – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif”

Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Program unggulan gubernur dan wakil gubernur terpilih Jawa Barat merupakan hal-hal yang strategis dan untuk itu perlu dikedepankan dalam upaya mencapai visi dan misi. Program unggulan RINDU, meliputi:

1. Akses pendidikan untuk semua, meliputi:
 - a. Kelas pintar untuk semua
 - b. 1 Universitas di setiap kabupaten/kota
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan, meliputi:
 - a. Layat rawat
 - b. Pembangunan dan perbaikan rumah sakit
 - c. Posyandu Juara
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi, meliputi:
 - a. Ekonomi digital
 - b. Inkubator bisnis
 - c. Creative/Start-up hub
 - d. Gudang tani dan ikan Juara
 - e. Kredit 0%
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata, meliputi:
 - a. 1 kabupaten/kota 1 destinasi wisata unggul
 - b. Infrastruktur pariwisata
 - c. Pengembang SDM pariwisata
5. Pesantren juara, meliputi:

- a. Modernisasi dana umat
 - b. Tunjangan santri dan ulama
 - c. Modernisasi manajemen pesantren
 - d. 1 pesantren 1 produk (trenmarket)
6. Infrastruktur konektivitas wilayah, meliputi:
- a. 100% jalan mulus di Jawa Barat
 - b. Pembangunan dan perbaikan jalan kereta
7. Gerakan bangun desa (Gerbang desa), meliputi:
- a. 1 desa 1 Bumdes (OVOP)
 - b. Tunjangan desa
 - c. Irigasi pertanian desa
 - d. Internet masuk desa
8. Subsidi gratis golekmah, meliputi:
- a. Rumah gratis
 - b. Transportasi gratis
 - c. Layanan kesehatan gratis
 - d. Pendidikan gratis
 - e. Sembako gratis
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah, meliputi:
- a. Provinsi pintar (E-planning budgeting, E-money, E-remunerasi kinerja, dll)
 - b. Kota/desa pintar
 - c. Pemekaran wilayah

Penetapan isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal. Dengan mengerahkan segenap potensi dan peluang serta sumber daya yang ada untuk mencari solusi bagi permasalahan dan tantangan pembangunan, diharapkan dapat ditetapkan isu strategis yang berdaya ungkit bagi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat. Sehingga isu strategis pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat, adalah:

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia
2. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial

3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan
5. Reformasi Birokrasi

Telaahan dari RPJMN dan RPJMD Jawa Barat masih ada beberapa faktor yang menjadi menghambat dan mendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah antara lain belum terpenuhinya kebutuhan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang ada di tingkat kewilayahan guna meningkatkan pelayanan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan tersedianya anggaran untuk pembangunan kewilayahan yang semakin membaik dengan harapan dapat meningkatkan inovasi pembangunan dikewilayahan sesuai kebutuhan masyarakat

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Penelaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Penelaahan dilakukan terhadap kesesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta rencana indikasi program pemanfaatan ruang. Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi secara geografis arah pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

A. Rencana Struktur Ruang

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
- b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan

prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan

- c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Untuk mendukung struktur ruang, rencana hirarki pusat pelayanan wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 3 hirarki, yaitu:

- a. Pusat Pelayanan Kota (PPK) melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
- b. Subpusat Pelayanan Kota (SPK) yang melayani Sub wilayah Kota (SWK); dan
- c. Pusat Lingkungan (PL).

Sesuai Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031, arahan struktur ruang dibagi menjadi 8 (delapan) Subwilayah Kota (SWK) yang dilayani oleh 2 (dua) Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan 8 (delapan) Subpusat Pelayanan Kota (SPK). Dalam RTRW Kota Bandung, PPK yang direncanakan terdiri dari PPK Alun-alun dan PPK Gedebage. PPK Alun-alun berada di bagian barat yang melayani SWK Bojongloa, Karees, Bojonegara dan Tegalega, sedangkan PPK Gedebage bagian timur melayani SWK Arcamanik, Derwati, Kordon, dan Ujungberung.

Pusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/ rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi, tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya.

Untuk pengembangan SPK di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- a. Subwilayah Kota Bojonagara dengan Subpusat Pelayanan Setrasari, meliputi Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir;
- b. Subwilayah Kota Bojongloa dengan Subpusat Pelayanan Sadang Serang meliputi Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Bojongloa Kidul, Bojongloa Kaler;
- c. Subwilayah Kota Tegallega dengan Subpusat Pelayanan Kopo Kencana,

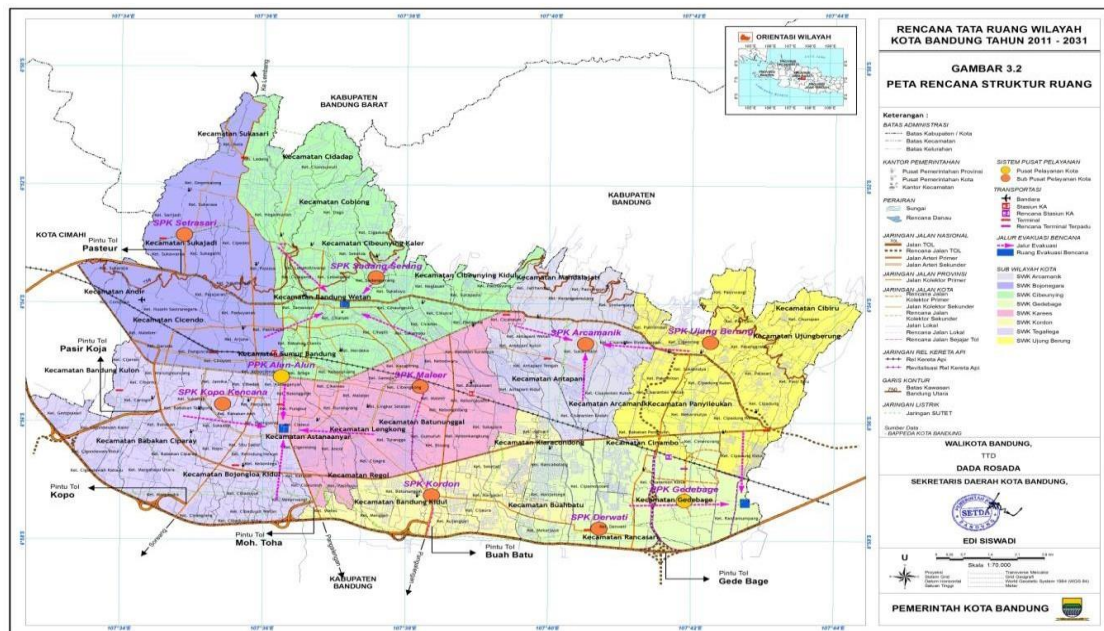
meliputi Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astana Anyar;

- d. Subwilayah Kota Karees dengan Subpusat Pelayanan Maleer, meliputi Kecamatan Regol, Lengkong, Kiaracondong, Batununggal;
- e. Subwilayah Kota Arcamanik dengan Subpusat Pelayanan Arcamanik, meliputi Kecamatan Arcamanik, Mandalajati, Antapani;
- f. Subwilayah Kota Ujungberung dengan Subpusat Pelayanan Ujungberung meliputi Kecamatan Cibiru, Ujungberung, Cinambo, Panyileukan;
- g. Subwilayah Kota Kordon dengan Subpusat Pelayanan Kordon, meliputi Kecamatan Bandung Kidul, Buah; dan
- h. Subwilayah Kota Gedebage dengan Subpusat Pelayanan Derwati, meliputi Kecamatan Gedebage, Rancasari.

SPK minimum memiliki fasilitas skala subwilayah kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Kemudian Pusat Lingkungan terdiri dari pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan dan kelurahan. Secara lengkap, rencana struktur ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut:

Gambar 3.1

Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung



B. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang terdiri dari pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pola ruang dalam RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 terdiri atas:

- a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;
- b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bandung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya. Dalam rangka perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung di Kota Bandung, rencana yang dilakukan:

- a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara; mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
- b. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta

melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;

- c. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;
- d. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
- e. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;
- f. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

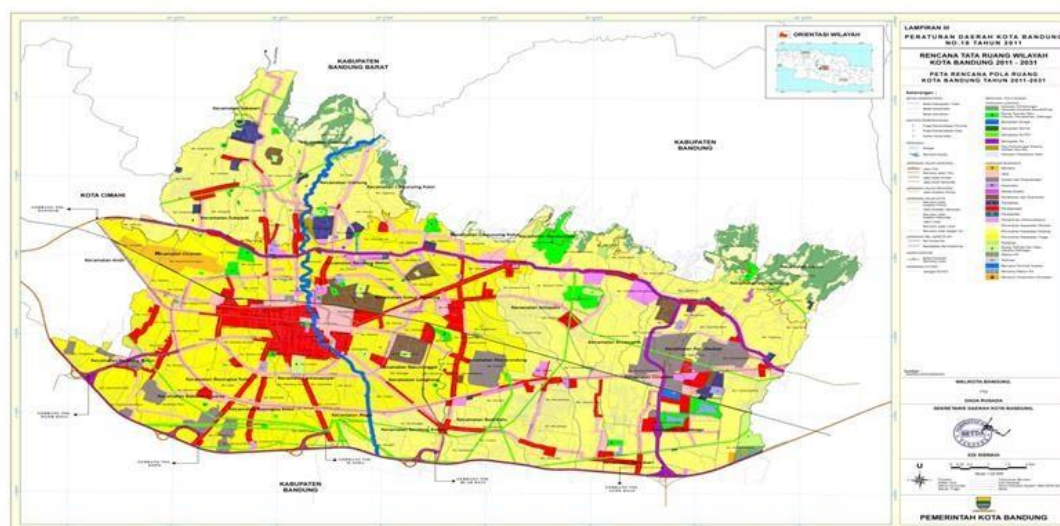
Kawasan budidaya terdiri dari atas kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya. Dalam rangka pengembangan kawasan budidaya, rencana yang dilakukan meliputi:

- a. mengembangkan pola ruang kota yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi;
- b. mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Bandung bagian timur yang terdiri atas SWK Arcamanik, SWK Ujung Berung, SWK Kordon, dan SWK Gedebage;
- c. mengendalikan bagian barat kota yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas SWK Bojonagara, SWK Bojongloa, SWK Tegallega, dan SWK Karees;
- d. membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTNH; dan
- f. menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada kawasan

peruntukan lainnya.

Secara lengkap, rencana pola ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut.

Gambar 3.2
Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung



3.4.2 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Periode IV)

Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan dalam RPJPD.

RPJPD Kota Bandung 2005-2025 telah mengamanatkan target capaian pembangunan daerah Kota Bandung setiap 5 (lima) tahunan. RPJPD secara teknis telah menetapkan indikator berikut target yang harus dipenuhi pada setiap periode/tahapan. Berikut hasil telaahan RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 Periode Perencanaan Tahun 2018-2023.

Tabel 3.1

**Hasil Telaahan RPJPD Kota Bandung
Tahun 2005-2025 Periode Perencanaan**

| No. | Arah Kebijakan RPJPD | Sasaran Pokok | Indikator | Target Kinerja Tahap III (2013-2018) | Realisasi Kinerja s.d. Periode (2013-2018) | Hasil Telaahan |
|-----|--|---|--|--------------------------------------|--|---|
| 1 | Terwujudnya Sumber daya manusia yang handal dan religius | Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan | IPM | 82,02 | 80,31 | Realisasi IPM termasuk tinggi, namun fertilitas masih tinggi. |
| | | | Jumlah penduduk (maksimal) | 2.835.223 Jiwa | 2.499.809 | |
| | | | Angka fertilitas | 1,85 | 1,96 | |
| | | Terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, kreatif dan kompetitif | Indeks pendidikan | 93,53 | Realisasi penerapan SPM melampaui target, namun rata-rata lama sekolah masih rendah. | |
| | | | Rata-rata lama sekolah | 12,17 Tahun | | 10,59 |
| | | | Sertifikasi guru | 75% | | |
| | | | Lembaga pendidikan di Kota Bandung yang telah menerapkan SPM | 75% | | 100% |
| | | | Angka melek huruf | 99,73 % | | 98,26% |
| | | Terwujudnya | Indeks kesehatan | 81,87 | Semua fasilitas | |

| No. | Arah Kebijakan RPJPD | Sasaran Pokok | Indikator | Target Kinerja Tahap III (2013-2018) | Realisasi Kinerja s.d. Periode (2013-2018) | Hasil Telaahan |
|-----|---|---|--|--|--|---|
| | | masyarakat yang sehat jasmani dan rohani | Angka harapan hidup | 74,45 | 73,86 | kesehatan telah memenuhi SPM, namun tingkat kematian bayi/ibu masih tinggi. |
| | Fasilitas kesehatan yang telah memenuhi SPM | | 90% | 100 | | |
| | Angka kematian bayi | | 29/1000 | 66 | | |
| | Jumlah kematian ibu melahirkan | | 11 orang/tahun | 16 | | |
| | Pemaparan zoonosis di wilayah Kota Bandung | | Kurang dari 12 % | Tidak ada kasus | | |
| | | Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia | Tingkat pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing | Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing | N/A | Data realisasi tidak tersedia. |
| | | | Tingkat Kerukunan umat beragama meliputi Kerukunan antar umat beragama, Kerukunan | Terwujudnya Sikap toleransi dan Kerukunan | | |

| No. | Arah Kebijakan RPJPD | Sasaran Pokok | Indikator | Target Kinerja Tahap III (2013-2018) | Realisasi Kinerja s.d. Periode (2013-2018) | Hasil Telaahan |
|-----|--|---|---|--|--|--|
| | | | Inter Umat Beragama, Kerukunan Antara umat beragama dengan Pemerintah | Umat Beragama | | |
| | | Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender | Tingkat pemahaman peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan | Terwujudnya pemahaman peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan | IPG pada tahun 2017 mencapai 95,52. | Realisasi IPG termasuk tinggi namun data realisasi hak-hak perlindungan perempuan dan anak tidak tersedia. |
| | | | Tingkat hak-hak perlindungan perempuan dan anak | Terwujudnya hak-hak perlindungan perempuan dan anak | | |
| 2 | Terwujudnya perekonomian kota yang berdaya saing | Terwujudnya perekonomian kota yang tangguh, berdaya saing serta sehat dan berkeadilan | Laju pertumbuhan ekonomi | 10,33% | N/A | Kondisi perekonomian cukup bagus namun tingkat pengangguran terbuka masih tinggi. |
| | | | Tingkat pemerataan pendapatan versi Bank Dunia | minimal 16% (kategori sedang) | | |
| | | | PDRB riil/kapita | minimal Rp 20 juta per tahun | N/A | |
| | | | Indeks daya beli | 70,66 | | |

| No. | Arah Kebijakan RPJPD | Sasaran Pokok | Indikator | Target Kinerja Tahap III (2013-2018) | Realisasi Kinerja s.d. Periode (2013-2018) | Hasil Telaahan |
|-----|---|--|---|--|--|--------------------------------|
| | | | Tingkat inflasi umum | satu digit | 3,46 | |
| | | | Tingkat pengangguran terbuka | maksimal 12% | 8,44 | |
| | | | Kesempatan kerja | minimal 92% | | |
| | | | Nilai investasi berskala nasional | meningkat 40% | | |
| | | Terwujudnya Pariwisata yang berdaya saing | Jumlah wisatawan | 35% | Data realisasi tidak tersedia. | |
| | | Terwujudnya kerjasama dan koordinasi yang menguntungkan dengan wilayah pemerintah Daerah lainnya | Sinergitas kegiatan ekonomi antar wilayah | Tumbuhnya kegiatan ekonomi antar daerah | | |
| 3 | Terwujudnya kehidupan sosial budaya kota yang kreatif, berkesadaran | Terwujudnya peningkatan mutu kerjasama di antara semua pemangku kepentingan | Akses informasi tentang pembangunan | Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang tahapan proses pembangunan | | Data realisasi tidak tersedia. |

| No. | Arah Kebijakan RPJPD | Sasaran Pokok | Indikator | Target Kinerja Tahap III (2013-2018) | Realisasi Kinerja s.d. Periode (2013-2018) | Hasil Telaahan |
|-----|--|--|---|--|--|------------------------------------|
| | tinggi serta berhati nurani. | dalam pembangunan Kota Bandung | Tingkat kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosial maupun fisik | Meningkatnya Rasa kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosial maupun fisik | | |
| | | Terwujudnya multikulturalisme dalam lingkungan Sunda yang inklusif | Pengembangan pusat – pusat kebudayaan | Terwadahnya heterogenitas budaya dalam lingkungan Budaya Sunda | | Data realisasi tidak tersedia. |
| | | | Sinergitas pelestarian budaya lokal Sunda antara pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat | Optimalnya hubungan pemerintah dengan pelaku budaya dan masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian budaya | | |
| 4 | Terwujudnya lingkungan hidup kota yang berkualitas | Terwujudnya kualitas udara dan air memenuhi baku mutu | Lokasi sampel yang telah memenuhi BM kualitas udara | 50% lokasi/sample telah memenuhi BM | 100 % lokasi/sampel telah memenuhi Baku Mutu | Kualitas udara dan air cukup baik. |

| No. | Arah Kebijakan RPJPD | Sasaran Pokok | Indikator | Target Kinerja Tahap III (2013-2018) | Realisasi Kinerja s.d. Periode (2013-2018) | Hasil Telaahan |
|-----|----------------------|--|---|--------------------------------------|--|---|
| | | Terjamin dan tersedianya kuantitas dan kualitas air (air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam) | Sungai dan anak sungai di Kota Bandung yang telah memenuhi baku mutu untuk parameter BOD dan COD | 17 % sungai dan anak sungai | 0 % sungai dan anak sungai Kota Bandung yang parameter COD dan BOD nya memenuhi baku mutu air kelas II pada PP No. 82 Tahun 2001 | Namun baku mutu air sungai dan anak sungai buruk, dan realisasi RTH belum tercapai. |
| | | | Kapasitas produksi air bersih dari sumber air baku | sebesar ± 5.750 liter/detik | N/A | |
| | | | Ruang terbuka hijau (RTH) kota yang efektif menunjang fungsi hidroorologi (dalam bentuk taman, hutan kota, sempadan sungai, kawasan konservasi dan RTH lainnya) | 23% | Indikator persentase RTH dalam kondisi baik di Kota Bandung dari target tahun 2017 sebesar 45,50% dan realisasi capaian kinerja 44,32% | |

| No. | Arah Kebijakan RPJPD | Sasaran Pokok | Indikator | Target Kinerja Tahap III (2013-2018) | Realisasi Kinerja s.d. Periode (2013-2018) | Hasil Telaahan |
|-----|----------------------|---|--|---|--|--|
| | | Terwujudnya pengelolaan limbah yang efektif dan bernilai ekonomi | Reduksi dan Peningkatan pemanfaatan kembali limbah padat | 90% sampah dapat dikelola (30 % reuse, reduce dan recycle, 60% ke pemrosesan akhir melalui pemanfaatan teknologi yang berwawasan lingkungan dan ekonomis 35 % , dan landfill 25 %). | Pada tahun 2017, 97,47 % sampah dapat ditangani (17,8 % reuse, reduce dan recycle, 1,4 % dimanfaatkan menjadi sumber energi dan 78,27 % ke pemrosesan akhir secara landfill) | Realisasi pengelolaan sampah cukup baik, namun besarnya persentase pemrosesan landfill perlu dikaji ulang. |
| | | Tersedianya Ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan | Terbentuk struktur ruang kota | Minimum 60% Kawasan Pusat Primer Gedebage terbangun dan semua Pusat WP berfungsi efektif | Keterbangunan PPK Gedebage mencapai 51,68 % (Pengukuran tingkat keterbangunan infrastruktur PPK Gedebage dilakukan melalui 280 LKPJ Akhir Masa Jabatan 2013 – 2018 | Realisasi keterbangunan dan pelayanan perizinan sesuai peraturan belum memenuhi target. |

| No. | Arah Kebijakan RPJPD | Sasaran Pokok | Indikator | Target Kinerja Tahap III (2013-2018) | Realisasi Kinerja s.d. Periode (2013-2018) | Hasil Telaahan |
|-----|----------------------|---------------|--------------------------------|---|---|----------------|
| | | | | | pendekatan 4 (empat) komponen, yaitu perencanaan dan perizinan (diberikan bobot 75%), pengadaan lahan (diberikan bobot 50%), proses konstruksi (diberikan bobot 75%) dan lahan yang sudah terbangun (diberikan bobot 100%). | |
| | | | Pengendalian pemanfaatan ruang | Meningkatnya pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku | Pencapaian target mencapai 85 % (dihitung dengan pengukuran berdasarkan 3 (tiga) aspek, antara lain: perencanaan, berupa | |

| No. | Arah Kebijakan RPJPD | Sasaran Pokok | Indikator | Target Kinerja Tahap III (2013-2018) | Realisasi Kinerja s.d. Periode (2013-2018) | Hasil Telaahan |
|-----|----------------------|---------------|-----------|---|---|----------------|
| | | | | | <p>ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang (RTRW, RDTR, dan Peraturan Wali Kota) sebesar 40%, pemanfaatan ruang (implementasi dokumen perencanaan antara lain perizinan, pertanahan, dan lain sebagainya) sebesar 30%, serta aspek pengawasan dan pengendalian tata ruang, persentase pelanggaran tata ruang dan bangunan yang diproses untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai ketentuan sebesar 15%.)</p> | |

| No. | Arah Kebijakan RPJPD | Sasaran Pokok | Indikator | Target Kinerja Tahap III (2013-2018) | Realisasi Kinerja s.d. Periode (2013-2018) | Hasil Telaahan |
|-----|----------------------|--|---|---|--|--|
| | | Tersedianya Sistem transportasi yang selamat, efisien, nyaman, terjangkau dan ramah lingkungan | Pengembangan (sistem) prasarana transportasi yang mendukung struktur ruang kota | Luas jalan min 4 % dari wilayah kota dan 100% berkondisi baik | persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik dengan target 100,00% realisasinya sebesar 100,00% atau terealisasi sebesar 100% melalui peningkatan jalan sepanjang 52.463,85 m, rehabilitasi jalan sepanjang 25.045,97 m, dan pemeliharaan jalan seluas 301.839,59 m ² . | Sistem transportasi belum memenuhi target yang ditentukan terutama aspek penyebab kemacetan. |
| | | | Indeks aksesibilitas | Indeks aksesibilitas | 7,74 dari target revisi | |

| No. | Arah Kebijakan RPJPD | Sasaran Pokok | Indikator | Target Kinerja Tahap III (2013-2018) | Realisasi Kinerja s.d. Periode (2013-2018) | Hasil Telaahan |
|-----|----------------------|---|---|--|--|---|
| | | | | minimum 7 km/km ² area | RPJMD sebesar 7,47 | |
| | | | Terwujudnya prasarana SAUM sesuai dengan rencana induk transportasi umum kota | 50% dari rencana prasarana SAUM terbangun, sesuai dengan rencana induk transportasi kota | Target sebesar 25:75 dengan realisasi sebesar 19,5 : 80,5 capaiannya masih di bawah target | |
| | | | Teratasinya aspek-aspek penyebab kemacetan (dari 32 aspek) | Teratasinya Aspek-aspek penyebab kemacetan 10 aspek* | | |
| | | Terwujudnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar teknis / standar pelayanan minimal | Penduduk kota yang dilayani air bersih dengan pengaliran kontinu 24 jam | 85% penduduk dilayani Air bersih dengan standar 120 liter/orang /hari dengan pengaliran kontinu 24 jam | N/A | Sarana dan prasana (infrastruktur) belum optimal melayani kebutuhan masyarakat. |
| | | | Berfungsinya TPA | Tempat | Kota Bandung | |

| No. | Arah Kebijakan RPJPD | Sasaran Pokok | Indikator | Target Kinerja Tahap III (2013-2018) | Realisasi Kinerja s.d. Periode (2013-2018) | Hasil Telaahan |
|-----|----------------------|---------------|--|---|--|----------------|
| | | | sampah yang berkelanjutan dengan sistem pengolahan yang ekonomis | Pemrosesan Akhir Sampah sudah berfungsi 100%. | sampai saat ini belum memiliki TPA Sampah secara mandiri dan masih dibuang ke TPAS Sarimukti | |
| | | | Penataan sistem drainase Kota yang tertata | Jaringan drainase primer dan sekunder kota terpadu; integrasi per wilayah pelayanan drainase kota; 75% sistem drainase kota terpadu | N/A | |
| | | | Kawasan kota yang terlayani oleh sistem penanganan air limbah yang terpadu dengan IPAL | 75% kawasan kota terlayani oleh sistem penanganan air limbah yang terpadu dengan IPAL | Tingkat pelayanan air limbah dengan sistem offsite dan onsite dari target 72 % realisasi sebesar 79,09 % | |

| No. | Arah Kebijakan RPJPD | Sasaran Pokok | Indikator | Target Kinerja Tahap III (2013-2018) | Realisasi Kinerja s.d. Periode (2013-2018) | Hasil Telaahan |
|-----|---|---|--|---|--|--------------------------------|
| | | Terwujudnya mitigasi Bencana yang handal | Peningkatan pengelolaan bencana | Meningkatnya penanganan bencana | | Data realisasi tidak tersedia. |
| 5 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan | Terwujudnya peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan yang aspiratif, antisipatif, aplikatif, akuntabel dan berdasarkan data base | Tingkat kualitas aparatur perencana dan pengelola data | Meningkatnya perencanaan dan pengelolaan data. | | Data realisasi tidak tersedia. |
| | | Terwujudnya masyarakat dan aparat yang sadar hukum dan HAM | Tingkat kualitas produk hukum yang produktif dan implementatif | Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dan aparat dalam penerapan produk hukum yang sinergi | | Data realisasi tidak tersedia. |

| No. | Arah Kebijakan RPJPD | Sasaran Pokok | Indikator | Target Kinerja Tahap III (2013-2018) | Realisasi Kinerja s.d. Periode (2013-2018) | Hasil Telaahan |
|-----|--|---|--|--|---|--|
| | | | | dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. | | |
| 6 | Terwujudnya sistem pembiayaan kota terpadu | Terwujudnya anggaran pemerintah yang optimal | Peningkatan Pendapatan Daerah | Rata-rata peningkatan Pendapatan 17% | Rata-rata peningkatan pendapatan daerah 16,5%. | Rata-rata peningkatan pendapatan cukup baik, namun pengembangan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional / kreatif belum optimal. Peran masyarakat dan sektor swasta dalam pembiayaan pembangunan kota belum dibangun dengan baik. |
| | | | Sinergitas APBN, APBD Propinsi & APBD Kota | APBN, APBD Prov & APBD Kota terintegrasi sepenuhnya | N/A | |
| | | | Pengembangan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional | Penggunaan instrumen pembiayaan pembangunan non konvensional mulai signifikan | Belum terdapat obligasi daerah & road fund | |
| | | Terwujudnya masyarakat dan sektor swasta berperan besar | Pengembangan sistem insentif terhadap swasta | Berbagai insentif fiskal tersedia untuk fasilitasi sektor swasta | Belum terumuskan | |

| No. | Arah Kebijakan RPJPD | Sasaran Pokok | Indikator | Target Kinerja Tahap III (2013-2018) | Realisasi Kinerja s.d. Periode (2013-2018) | Hasil Telaahan |
|-----|----------------------|-----------------------------------|---|--|---|----------------|
| | | dalam pembiayaan pembangunan kota | Pengembangan sistem pembiayaan dengan kemitraan pemerintah dan swasta | Berfungsinya perusahaan patungan untuk beberapa layanan jasa umum & barang publik | Belum terbentuk | |
| | | | Pengembangan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional | Berfungsinya instrumen pembiayaan pembangunan non konvensional berbasis masyarakat | Belum terbangun instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional | |
| | | | Penyediaan insentif dan fasilitasi untuk keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan serta pemanfaatan dan pemeliharaan barang dan jasa publik | Berbagai insentif fiskal tersedia untuk fasilitasi masyarakat dalam pembangunan, pelaksanaan dan pemeliharaan, barang & jasa publik tersedia | Belum terdapat insentif | |

Sumber: RKPD Kota Bandung Tahun 2005-2025, LKPD AMJ Wali Kota Bandung Tahun 2013-2018

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung pada tahun 2014 - 2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

Tabel 3.2

**Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung
dan Dinamika Lingkungan Strategis**

| No. | Tupoksi | Isu Strategis |
|-----|--|---|
| 1. | Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat; | <p>1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> <p>Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.</p> <p>2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (<i>services excelent</i>) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal <i>public services and public complaint</i>. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan <i>good governance</i>. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur</p> |
| 2. | Mengkoordinasikan ketenteraman dan ketertiban umum; | |
| 3. | Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; | |
| 4. | Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; | |

| | | |
|----|--|--|
| 5. | mbina pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya | <p>adalah budaya kerja aparaturnya yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparaturnya sebagai 'pelayan masyarakat'. Selain hal itu sumber daya aparaturnya juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).</p> <p>Pendayagunaan aparaturnya pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparaturnya pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (<i>public service reform</i>) dalam rangka mewujudkan <i>good governance</i>.</p> <p>3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik</p> <p>Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (<i>good governance</i>) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.</p> <p>Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparaturnya kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai <i>stakeholder</i>, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai <i>shareholder</i>.</p> <p>Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki <i>reward and punishment system</i>, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.</p> <p>4. Pengelolaan Keuangan dan Barang</p> <p>Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada <i>entrepreneurial management</i> yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (<i>Performance Budget</i>), bukan pada kebijakan (<i>Policy Budget</i>).</p> <p>Sistem manajemen keuangan daerah (<i>financial management system</i>) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya <i>good governance</i> di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep <i>value for money</i> sehingga tercipta akuntabilitas publik (<i>public accountability</i>).</p> <p>Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan,</p> |
|----|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan;(2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;(3) Pengamanan barang daerah;(4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah. |
|--|--|---|



Tujuan, dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bojongloa Kidul

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan Kecamatan. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung mencapai Visi dan Misi Kota Bandung, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah Kota Bandung. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi yang akan menjadi panduan Pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan dengan memformulasikan *short term outcome* untuk strategi. Melalui penerapan instrumen ini dapat dilihat kehandalan suatu program untuk mewujudkan sasaran daerah yang telah direncanakan dengan perumusan strategi berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan logic model.

Tabel

Tujuan, Sasaran, dan Strategi Setiap Misi

| Tujuan | Sasaran | Strategi |
|---|--|---|
| Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih | | |
| Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien | Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur |
| | | Meningkatkan integritas aparatur sebagai pelayan masyarakat |
| | | Meningkatkan kapasitas manajemen pengawasan |

| | | |
|---|--|--|
| | | Penguatan kelembagaan tepat ukuran dan tepat fungsi |
| | | Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan |
| | | Meningkatkan kinerja instansi pemerintah |
| | | Meningkatkan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien |
| | | Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas |
| Misi 5 : Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi | | |
| Optimalisasi Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan | Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan | Mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam berpartisipasi dan berkolaborasi pada pembangunan kota |
| | Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan | Mengembangkan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang melalui kerjasama daerah (antara lain, pengelolaan TJSL/TJSL, kerjasama pemerintah daerah dengan pihak lain, pembiayaan infrastruktur non anggaran pemerintah, dan lain-lain |

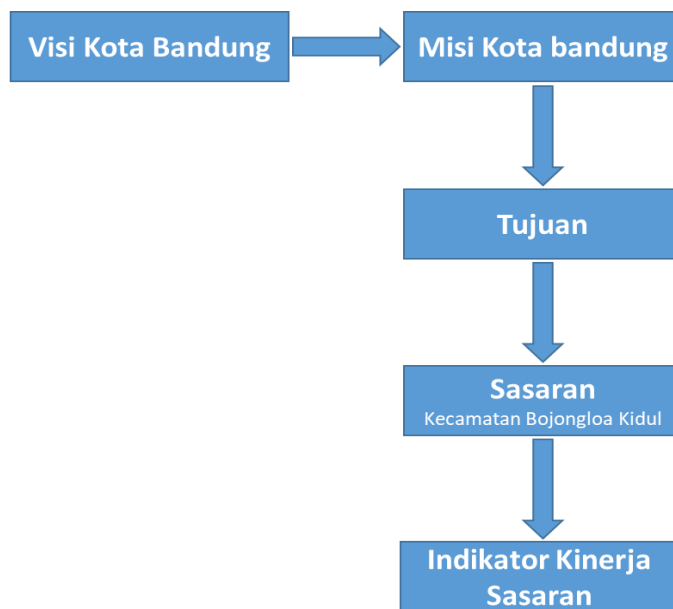
Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari Kecamatan Bojongloa Kidul menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis Kecamatan Bojongloa Kidul.

Keselarasan hubungan antara tujuan dan sasaran serta indikator Renstra Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung Tahun 2018 – 2023, dapat dilihat

dalam penjelasan dibawah ini :

Gambar 4.1

Alur Kaitan Visi dan Misi Kota Bandung dengan Fungsi Kecamatan Bojongloa Kidul:



Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bojongloa Kidul Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi Kota Bandung yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan 1 (satu) misi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung adalah sebanyak 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran sebagai berikut :

Tujuan:

a. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat

Indikator Tujuan: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bojongloa Kidul**Sasaran :**

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik di Kecamatan Bojongloa Kidul

Indikator Sasaran:

- a. Rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bojongloa Kidul
 - b. Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu
2. Meningkatnya Peran Kelembagaan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Indikator Sasaran:

- a. Persentase Kelurahan Unggul

b. Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat

Indikator Tujuan:

Tingkat dukungan dan pemberdayaan masyarakat kepada program pemerintah dalam pembangunan kewilayahan

Sasaran :

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Sasaran:

Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan

Dari dua tujuan dan tiga sasaran yang ada pada Kecamatan Bojongloa Kidul, dua duanya merupakan kewenangan kecamatan untuk pengelolaannya, yang dapat diuraikan dalam table sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat
Daerah Tahun 2018 – 2023
Sebelum Reviu

| No | Tujuan | Sasaran | | Indikator Tujuan/Sasaran | Formulasi | Satua | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke- | | | | |
|-----|----------------------------------|---|---|--|--|-------|--|--------|--------|-------|-------|
| | | | | | | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Meningkatkan Kepuasan Masyarakat | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bojongloa Kidul | IKM Kecamatan ditambah dengan IKM 6 kelurahan dibagi 7 | Nilai | 80,00 | 80.20 | 80.50 | 80.80 | 81.20 |
| | | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Di Kecamatan Bojongloa Kidul | 1 | Rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bojongloa Kidul | Jumlah IKM Kecamatan ditambah dengan kelurahan dibagi 7 | Nilai | 80,00 | 80.20 | 80.50 | 80.80 | 81.20 |
| | | | 2 | Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu | Jumlah temuan BPK yang ditindaklanjuti dibagi dengan total jumlah temuan BPK | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Meningkatnya Peran Kelembagaan Masyarakat Dalam | 3 | Persentase Kelurahan Unggul | Jumlah kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul dibagi 6 | % | 50% | 66.66% | 83.33% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|---|-------|----|----|----|----|
| | | Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | | | | | | | | | |
| 2 | Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat | | | Tingkat dukungan dan pemberdayaan masyarakat kepada program pemerintah dan pembangunan kewilayahan | Jumlah program walikota yg diakomodir/dilaksanakan di bagi dengan jumlah total sub kegiatan | % | 21.45 | 50 | 65 | 70 | 75 |
| | | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat | 4 | Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul | % RW Unggul + LKK Unggul + Siskamling Aktif dibagi 3 | % | 21.45 | 50 | 65 | 70 | 85 |

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat
Daerah Tahun 2018 – 2023
Setelah Reviu

| No | Tujuan | Sasaran | | Indikator Tujuan/Sasaran | Formulasi | Satuan | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke- | | | | |
|-----|----------------------------------|---|---|--|---|--------|--|--------|--------|--------|-------|
| | | | | | | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Meningkatkan Kepuasan Masyarakat | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bojongloa Kidul | Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan | Nilai | 80,00 | 80.20 | 83.00 | 84.00 | 85.00 |
| | | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Di Kecamatan Bojongloa Kidul | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bojongloa Kidul | Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan | Nilai | 80,00 | 80.20 | 83.00 | 84.00 | 85.00 |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan | 2 | Persentase Kelurahan Unggul | Jumlah kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul dibagi 6 | % | 50% | 66.67% | 66.67% | 83.33% | 100% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|-------|----|-------|----|-------|
| | | Kecamatan Bojongloa Kidul | | | | | | | | | |
| 2 | Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat | | Tingkat dukungan dan pemberdayaan masyarakat kepada program pemerintah dan pembangunan kewilayahan | | Jumlah program walikota yg di akomodir/dilaksanakan di bagi dengan jumlah total sub kegiatan | % | 21.45 | 50 | | 70 | 75 |
| | | Meningkatnya ketentrman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Bojongloa Kidul | 3 | Persentase siskamling RW Aktif | Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100% | % | - | - | 68.18 | 75 | 84.09 |
| | | meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan Bojongloa Kidul | 4 | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul | Jumlah LKK yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh LKK yang ada di kec dikali 100% | | 21.45 | 50 | 76.36 | 80 | 82 |



RENSTRA 2018-
2023

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Organisasi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam menunjang keberhasilan misi pembangunan daerah Kota Bandung yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan perangkat daerah sehingga dapat memberikan gambaran pelayan kepada masyarakat. Dengan *grand design* yang baik dapat menjawab suatu permasalahan baik yang sudah terjadi, sedang terjadi dan yang akan terjadi. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan di kewilayahan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya dan merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan perangkat daerah.

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kota Bandung tahun 2018-2023 yaitu analisis *Logic Model* atau Model Logika.

Logic model adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. *Logic model* ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. *Logic model* adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara

masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan yang terlibat dan terdampak.

Logic model membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kota Bandung. Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, output pada urusan teknis atau perangkat daerah.

Hubungan antara unsur-unsur terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi pemerintah maupun pada perangkat daerah. Visualisasi logic model dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 5.1
Logic Model

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Sebelum Reviu

| | | | |
|--|---|--|--|
| Visi | Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis | | |
| Misi 2 | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatkan Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Di Kecamatan Bojongloa Kidul | Mengoptimalkan Sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat | Meningkatkan kualitas pelayanan publik |
| | Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan | Meningkatkan Peran Serta Lembaga masyarakat dalam Pembangunan | Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan |
| Misi 5 | Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif kolaboratif dan Terintegrasi | | |
| Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat | Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan | Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat |

Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Setelah Reviu

| | | | |
|---|---|--|--|
| Visi | Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis | | |
| Misi 1 | Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Bojongloa Kidul | Mengoptimalkan Sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat | Meningkatkan kualitas pelayanan publik |
| | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan Bojongloa Kidul | Meningkatkan Peran Serta Lembaga masyarakat dalam Pembangunan | Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan |
| Misi 2 | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, Efektif, Efisien dan bersih | | |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Bojongloa Kidul | Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Bojongloa Kidul | Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan | Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat |
| | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bojongloa Kidul | | |

5.2 Analisis Logic Model

Untuk menentukan strategi yang tepat, dapat menggunakan **logic model** yaitu adalah suatu gambaran yang sistematis mengenai teori perubahan, ia merupakan studi kumulatif dari keterkaitan antara aktifitas, outcomes dan konteks, atau untuk melihat bagaimana dan mengapa sebuah program bekerja. Dalam rangka melaksanakan restrukturisasi program dan kegiatan pada kementerian/lembaga, pendekatan *logic model* dipandang cukup menjanjikan pemahaman para penyusun dokumen anggaran pada

kementerian/lembaga. *logic model* adalah gambaran visual logis dari suatu program yang menunjukkan rangkaian/hubungan antara input, aktivitas, sampai dengan output dan outcome yang diharapkan sebagai respon terhadap suatu situasi yang dihadapi organisasi. Dengan pendekatan *logic model*, keterkaitan struktur anggaran dari program, kegiatan, output, komponen, dan jenis belanja, menjadi lebih logis/relevan. Berikut ini adalah logic model yang disusun untuk menjelaskan keterkaitan program dan kegiatan Kecamatan Cicendo dengan RPJMD.



**RENSTRA
2018-2023**

BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan

dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut

menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Bojongloa Kidul pada periode 2018-2023. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya factor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan public lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan dalam rangka pencapaian 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran kinerja Kecamatan Bojongloa Kidul periode tahun 2018-2013 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Kecamatan Bojongloa Kidul

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi | |
|--------|---------|-------------|---|---|-------------------------------------|---|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---|--|----------------------|-----------|
| | | | | | | Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | Tahun-5 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | | | Rp |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| | | 4.34.01 | Program pelayanan administrasi perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi | 100% | 100% | 1,869,102,951 | 100% | 1.776.573.379 | 100% | 1.828.025.950 | 100% | 1.932.761.654 | 100% | 1.841.932.675 | 100% | 11,411,060,426 | Kec. Bojongloa Kidul | Kec + Kel |
| | | 4.34.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. | Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 Lap | 12 Lap | 195,148,299 | 12 Lap | 214,663,129 | 12 Lap | 236,129,442 | 12 Lap | 259,742,386 | 12 Lap | 285,716,625 | 12 Lap | 1,191,399,880 | Kec. Bojongloa Kidul | Kec + Kel |
| | | 4.34.01.006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional. | Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya | 8 Unit | 8 Unit | 4,800,000 | 8 Unit | 5,280,000 | 8 Unit | 5,808,000 | 8 Unit | 6,388,800 | 8 Unit | 7,027,680 | 8 Unit | 29,304,480 | Kec. Bojongloa Kidul | Kecamatan |
| | | 4.34.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor. | Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor | 12 Jasa bulanan | 12 Jasa bulanan | 4,800,000 | 12 Jasa bulanan | 5,280,000 | 12 Jasa bulanan | 5,808,000 | 12 Jasa bulanan | 6,388,800 | 12 Jasa bulanan | 7,027,680 | 12 Jasa bulanan | 29,304,480 | Kec. Bojongloa Kidul | Kec + Kel |
| | | 4.34.01.009 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. | Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi | 12 lap | 12 lap | 60,300,000 | 12 Lap | 66,330,000 | 12 Lap | 72,963,000 | 12 Lap | 80,259,300 | 12 Lap | 88,285,230 | 12 Lap | 368,137,530 | Kec. Bojongloa Kidul | Kec + Kel |
| | | 4.34.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor | 12 Lap | 12 Lap | 138,680,847 | 12 Lap | 152,548,932 | 12 Lap | 167,803,825 | 12 Lap | 184,584,207 | 12 Lap | 203,042,628 | 12 Lap | 846,660,439 | Kec. Bojongloa Kidul | Kec + Kel |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|---|--------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------|-----------|
| | | 4.34.0 1.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. | Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terrealisasi | 12 Lap | 12 Lap | 74,696,212 | 12 Lap | 82,165,833 | 12 Lap | 90,382,417 | 12 Lap | 99,420,658 | 12 Lap | 109,362,724 | 12 Lap | 456,027,844 | Kec. Bojongloa Kidul | Kec + Kel |
| | | 4.34.0 1.012 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi | 12 Lap | 12 Lap | 27,439,225 | 12 Lap | 30,183,148 | 12 Lap | 33,201,462 | 12 Lap | 36,521,608 | 12 Lap | 40,173,769 | 12 Lap | 167,519,213 | Kec. Bojongloa Kidul | Kec + Kel |
| | | 4.34.0 1.013 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. | Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi | 12 Lap | 12 Lap | 200,678,037 | 12 Lap | 220,745,841 | 12 Lap | 242,820,425 | 12 Lap | 267,102,467 | 12 Lap | 293,812,714 | 12 Lap | 1,225,159,484 | Kec. Bojongloa Kidul | Kec + Kel |
| | | 4.34.0 1.014 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi | 12 Lap | 12 Lap | 38,927,554 | 12 Lap | 42,820,309 | 12 Lap | 47,102,340 | 12 Lap | 51,812,574 | 12 Lap | 56,993,832 | 12 Lap | 237,656,610 | Kec. Bojongloa Kidul | Kec + Kel |
| | | 4.34.0 1.015 | Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan. | Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan | 12 Lap | 12 Lap | 38,343,600 | 12 Lap | 42,177,960 | 12 Lap | 46,395,756 | 12 Lap | 51,035,332 | 12 Lap | 56,138,865 | 12 Lap | 234,091,512 | Kec. Bojongloa Kidul | Kec + Kel |
| | | 4.34.0 1.017 | Penyediaan makanan dan minuman. | Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman terrealisasi | 12 lap | 12 lap | 196,639,177 | 52 Lap | 216,303,095 | 52 Lap | 237,933,404 | 52 Lap | 261,726,745 | 52 Lap | 287,899,419 | 52 Lap | 1,200,501,840 | Kec. Bojongloa Kidul | Kec + Kel |
| | | 4.34.0 1.018 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 6 Lap | 6 Lap | 129,050,000 | 6 Lap | 141,955,000 | 6 Lap | 156,150,500 | 6 Lap | 171,765,550 | 6 Lap | 188,942,105 | 6 Lap | 787,863,155 | Kec. Bojongloa Kidul | Kecamatan |
| | | 4.34.0 1.019 | Penyediaan jasa tenaga kerja pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran | Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran | 12 Lap | 12 Lap | 759,600,000 | 12 Lap | 835,560,000 | 12 Lap | 919,116,000 | 12 Lap | 1,011,027,600 | 12 Lap | 1,112,130,360 | 12 Lap | 4,637,433,960 | Kec. Bojongloa Kidul | Kec + Kel |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---|---|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------------------|------------------|
| | | 4.34.0 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik | 100% | 100% | 952,087,211 | 100% | 907.768.891 | 100% | 1.128.985.015 | 100% | 1.127.832.989 | 100% | 1.031.523.655 | 100% | 4,982,630,674 | Kec. Bojongloa Kidul | Kec + Kel |
| | | | <i>Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur</i> | <i>Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur</i> | n/a | 5 Unit | 117,486,307 | 6 Unit | 129,234,938 | 7 Unit | 142,158,431 | 7 Unit | 156,374,275 | 5 Unit | 172,011,702 | 5 Unit | 717,265,653 | Kec. Bojongloa Kidul | Kec + Kel |
| | | 4.34.0 2.024 | <i>Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas</i> | Jumlah unit kendaraan dinas/operasional terpelihara | 37 unit | 30 unit | 575,637,740 | 37 unit | 633,201,514 | 37 unit | 696,521,665 | 37 unit | 766,173,832 | 37 unit | 842,791,215 | 37 unit | 3,514,325,966 | Kec. Bojongloa Kidul | Kec + Kel |
| | | 4.34.0 2.042 | <i>Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor</i> | Jumlah unit bangunan terpelihara | 3 Unit | 3 Unit | 213,963,164 | 6 Unit | 235,359,480 | 5 Unit | 258,895,428 | 5 Unit | 284,784,971 | 6 Unit | 313,263,468 | 6 Unit | 1,306,266,513 | Kec. Bojongloa Kidul | Kec + Kel |
| | | | <i>Rehab sedang berat gedung kantor</i> | Jumlah gedung yang direhab | 2 Unit | 2 Unit | 45,000,000 | 2 Unit | 49,500,000 | 2 Unit | 54,450,000 | 2Unit | 59,895,000 | 1 Unit | 65,884,500 | 1 Unit | 274,729,500 | Kec. Bojongloa Kidul | Kec + Kel |
| | | 4.34.0 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai | 100% | 100% | 36,900,000 | 100% | 40.995.900 | 100% | 43.756.020 | 100% | 43.711.371 | 100% | 39.978.715 | 100% | 225,278,190 | Kec. Bojongloa Kidul | Kec + Kel |
| | | 4.34.0 3.002 | <i>Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya</i> | Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya terrealisasi | 65 stel | 65 stel | 34,500,000 | 65 stel | 37,950,000 | 65 stel | 41,745,000 | 65 stel | 45,919,500 | 65 stel | 50,511,450 | 65 stel | 210,625,950 | Kec. Bojongloa Kidul | Kecamatan |
| | | 4.34.0 3.005 | <i>Pengadaan pakaian kerja lapangan</i> | Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu terrealisasi | n/a | n/a | 2,400,000 | 6 stel | 2,640,000 | 6 stel | 2,904,000 | 6 stel | 3,194,400 | 6 stel | 3,513,840 | 6 stel | 14,652,240 | Kec. Bojongloa Kidul | Kec + Kel |
| | | 4.34.0 3.005 | <i>Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu</i> | Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Terrealisasi | n/a | n/a | n/a | 65 stel | 35,750,000 | 65 stel | 39,325,000 | 65 stel | 43,257,500 | 65 stel | 47,583,250 | 65 stel | 165,915,750 | Kec. Bojongloa Kidul | Kecamatan |
| | | 4.34.0 5 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur | Cakupan Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | n/a | 100% | 106,020,000 | 100% | 117.788.220 | 100% | 125.718.516 | 100% | 125.590.232 | 100% | 114.865.673 | 100% | 541,242,702 | Kec. Bojongloa Kidul | Kec + Kel |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------|--|--|-------|---------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|------------|
| | | 4.34.05.04 | Kegiatan Pembinaan kinerja Aparatur | Jumlah peserta kegiatan pembinaan aparatur | n/a | 1 paket | 106,020,000 | 1 paket | 116,622,000 | 1 paket | 128,284,200 | 1 paket | 141,12,620 | 1 paket | 155,223,882 | 1 paket | 541,242,702 | Kec. Bojongloa Kidul | Kecamat an |
| Meningkatkan Kepuasan Masyarakat | | | | Rata Rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bojongloa Kidul | 82.12 | 80.00 | 0 | 80.20 | 2,490,510,666 | 80.50 | 2,739,561,733 | 80.80 | 3,013,517,906 | 81.20 | 3,314,869,696 | 81.20 | 10,482,710,001 | Kec. Bojongloa Kidul | Kec + Kel |
| | Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan | | | Persentase Kelurahan Unggul | n/a | 50 | 0 | 66.66 | 2,490,510,666 | 83.33 | 2,739,561,733 | 100.00 | 3,013,517,906 | 100.00 | 3,314,869,696 | 100.00 | 10,482,710,001 | Kec. Bojongloa Kidul | Kec + Kel |
| | | | Program peningkatan peran kelembagaan masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan | Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan | n/a | n/a | 0 | 80% | 1.300.000.000 | 82% | 1.350.000.000 | 85% | 1.400.000.000 | 87% | 1.400.000.000 | 87% | 10,482,710,001 | Kec. Bojongloa Kidul | Kec + Kel |
| | | 4.34.15.005 | Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan | Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif | n/a | n/a | 0 | 21 RW | 1,659,638,090 | 25 RW | 1,825,601,899 | 28 RW | 2,008,162,089 | 30 RW | 2,208,978,298 | 30 RW | 7,702,380,376 | Kec. Bojongloa Kidul | Kec + Kel |
| | | 4.34.25.005 | Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan | Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif | n/a | n/a | 0 | 186 Kader | 505,872,576 | 187 Kader | 556,459,834 | 188 Kader | 612,105,817 | 190 Kader | 673,316,399 | 190 Kader | 2,347,754,625 | Kec. Bojongloa Kidul | Kec + Kel |
| | | 4.34.33.001 | Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial | Jumlah kelompok/kader /lembaga yang mengikuti lomba tk kota | n/a | n/a | 0 | 52 Kader/ Klp | 325,000,000 | 52 Kader/ Klp | 357,500,000 | 52 Kader/ Klp | 393,250,000 | 52 Kader / Klp | 432,575,000 | 52 Kader / Klp | 432,575,000 | Kec. Bojongloa Kidul | Kec + Kel |
| | | 4.34.19.053 | Kegiatan Pemberdayaan KUMKM Kewilayahan | Pembentukan koperasi ditempat Ibadah | n/a | n/a | 0 | 1 Kelompok | 78,055,560 | 1 Kelompok | 85,861,116 | 1 Kelompok | 94,447,228 | 1 Kelompok | 103,891,950 | 1 Kelompok | 114,281,145 | Kec. Bojongloa Kidul | Kec + Kel |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| | | 4.34.1 9.0.53 | Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan | Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan | n/a | n/a | 0 | 1 Lap | 77,000,000 | 1 Lap | 84,700,000 | 1 Lap | 93,170,000 | 1 Lap | 102,487,000 | 1 Lap | 112,735,700 | Kec. Bojongloa Kidul | Kec + Kel |
| | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Bojongloa Kidul | | | Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bojongloa Kidul | 82.12 | 80.00 | 3,086,088,710 | 80.20 | 3,970,281,697 | 80.50 | 4,367,309,866 | 80.80 | 4,804,040,853 | 81.20 | 5,284,444,938 | 81.20 | 21,512,166,063 | | |
| | | 4.34.20 | Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik | 82.12 | 80.00 | 939,346,645 | 80.2 | 1.413.000.000 | 80.5 | 1.582.560.000 | 80.8 | 1.772.467.200 | 81.2 | 1.985.163.264 | 81.2 | 9,387,203,144 | Kec. Bojongloa Kidul | Kec + Kel |
| | | 4.34.20.01 | Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan | Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap | 33 lap | 33 lap | 797,990,845 | 33 lap | 877,789,930 | 33 lap | 965,568,922 | 33 lap | 1,062,125,815 | 33 lap | 1,168,338,396 | 33 lap | 4,871,813,908 | Kec. Bojongloa Kidul | Kec + Kel |
| | | 4.34.20.02 | Kegiatan Pembinaan RT RW | Laporan RW tepat waktu dan lengkap | n/a | 100 % | 141,355,800 | 100 % | 942,476,500 | 100 % | 1,036,724,150 | 100 % | 1,140,396,565 | 100 % | 1,254,436,222 | 100 % | 4,515,389,237 | Kec. Bojongloa Kidul | Kec + Kel |
| | | 4.34.42 | Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum | Prosentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi bersih | n/a | 100% | 2,146,742,065 | 100% | 2.085.030.434 | 100% | 2.245.606.741 | 100% | 2.243.009.183 | 100% | 2.025.853.342 | 100% | 12,124,962,919 | Kec. Bojongloa Kidul | Kec + Kel |
| | | 4.34.42.015 | Kegiatan Pemeliharaan RTH Kecamatan | luas RTH kecamatan terpelihara | 800 m ² | 800 m ² | 106,947,570 | 800 m ² | 117,642,327 | 800 m ² | 129,406,560 | 800 m ² | 142,347,216 | 800 m ² | 156,581,937 | 800 m ² | 652,925,610 | Kec. Bojongloa Kidul | Kec + Kel |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------|
| | | 4.34.4 2.014 | <i>Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan</i> | <i>Panjang Drainase terpelihara</i> | 67.720 m | 67.720 m | 1,833,975,400 | 67.720 m | 2,017,372,940 | 67.720 m | 2,219,110,234 | 67.720 m | 2,441,021,257 | 67.720 m | 2,685,123,383 | 67.720 m | 11,196,603,215 | Kec. Bojongloa Kidul | Kec + Kel |
| | | 4.34.4 2.016 | <i>Kegiatan pengecatan Kerb bahu jalan</i> | <i>Panjang kerb terpelihara</i> | 15.760 m ² | 15.760 m ² | 205,819,095 | 15.760 m ² | 15,000,000 | 15.760 m ² | 16,500,000 | 15.760 m ² | 18,150,000 | 15.760 m ² | 19,965,000 | 15.760 m ² | 275,434,095 | Kec. Bojongloa Kidul | Kec + Kel |
| Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat | | | | Tingkat dukungan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada program pemerintah dalam pembangunan kewilayah | 80% | 21.45% | 6,199,639,013 | 50% | 7.299.639.013 | 65% | 8.175.595.695 | 70% | 9.156.667.178 | 75% | 10.255.467.239 | 75% | 36,549,639,013 | Kec. Bojongloa Kidul | |
| | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat | | | Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan kewilayah | 80% | 21.45% | 6,199,639,013 | 50% | 7.299.639.013 | 65% | 8.175.595.695 | 70% | 9.156.667.178 | 75% | 10.255.467.239 | 75% | 36,549,639,013 | Kec. Bojongloa Kidul | Kec + Kel |
| | | 4.34.2 6 | Program Pemberdayaan Kewilayah | Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan | 80% | 21.45% | 6,199,639,013 | 50% | 7.299.639.013 | 65% | 8.175.595.695 | 70% | 9.156.667.178 | 75% | 10.255.467.239 | 85% | 36,549,639,013 | Kec. Bojongloa Kidul | Kec + Kel |
| | | 4.34.2 6.01 | <i>Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW</i> | <i>Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW</i> | 127 Sub | 127 Sub | 4.400.000.000 | 127 Sub | 4.400.000.000 | 127 Sub | 4.400.000.000 | 127 Sub | 4400000000 | 127 Sub | 4400000000 | 635 Sub | 22.000.000.000 | Kec. Bojongloa Kidul | Kelurahan |
| | | 4.34.2 6.02 | <i>Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK</i> | <i>Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup PKK</i> | 65 sub | 65 sub | 600.000.000 | 65 sub | 600.000.000 | 65 sub | 600.000.000 | 65 sub | 600.000.000 | 65 sub | 600.000.000 | 65 sub | 3.000.000.000 | Kec. Bojongloa Kidul | Kelurahan |
| | | 4.34.2 6.03 | <i>Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang Taruna</i> | <i>Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna</i> | 40 Sub | 40 Sub | 600.000.000 | 40 Sub | 600.000.000 | 40 Sub | 600.000.000 | 40 Sub | 600.000.000 | 40 Sub | 600,000,000 | 40 Sub | 3.000.000.000 | Kec. Bojongloa Kidul | Kelurahan |
| | | 4.34.2 6.04 | <i>Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM</i> | <i>Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup LPM</i> | 54 Sub | 54 Sub | 600.000.000 | 54 Sub | 600.000.000 | 54 Sub | 600.000.000 | 54 Sub | 600.000.000 | 54 Sub | 600,000,000 | 170 Sub | 3.000.000.000 | Kec. Bojongloa Kidul | Kelurahan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|--|--------|-----------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 4.34.19 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Tingkat dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu | 25% | 25% | 70,959,600 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.34.19.053 | <i>Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan</i> | <i>Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan</i> | n/a | 1 Lap | 70,959,600 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.34.25 | Program Pemberdayaan KUMKM | Prosentase Koperasi di tempat ibadah | 86.15% | 86.15% | 70,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.34.25.01 | <i>Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan</i> | Pembentukan koperasi ditempat ibadah | n/a | n/a | 70,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.34.15 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana | 100 | 100 | 1,508,761,900 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.34.15.005 | <i>Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan</i> | <i>Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif</i> | 17 RW | 19 RW | 1,508,761,900 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.34.25 | Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat | Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan | n/a | 75 | 503,084,160 | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Kegiatan Penguatan Kelembagaan Masyarakat</i> | <i>Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif</i> | | 40 Kader | 43,200,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.34.25.005 | <i>Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan</i> | <i>Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif</i> | n/a | 185 Kader | 459,884,160 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---|--|--------|-----------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 4.34.3 3 | Program Peningkatan Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan | Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | 91.66% | 91.66% | 324,813,600 | | | | | | | | | | | |
| | | 4.34.3 3.001 | <i>Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial</i> | <i>Jumlah kelompok/kader /lembaga yang mengikuti lomba tk kota</i> | n/a | 6 Kader/ Klp | 324,813,600 | | | | | | | | | | | |

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dirinci program-program utama yang mendukung secara langsung pencapaian kinerja utama Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung berdasarkan 4 (Empat) sasaran yang telah ditetapkan, meliputi 8 (delapan) program dan 7 (tujuh) kegiatan indikatif.

Adapun Program dan kegiatan yang telah dirumuskan untuk tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017- 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019- 2023

| Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) |
|---|--|
| 1 | 2 |
| Program pelayanan administrasi perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi |
| Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor |
| Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang |

| | |
|--|---|
| | terrealisasi |
| Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi |
| Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi |
| Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi |
| Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan |
| Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman terrealisasi |
| Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran | Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik |
| Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah unit bangunan terpelihara |
| Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara |
| Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | - Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi |

| | |
|--|--|
| Program peningkatan disiplin aparatur | Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai |
| Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya. | - Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
| Pengadaan pakaian kerja lapangan | - Jumlah pakaian kerja lapangan |
| Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | - Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya |
| Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur | - Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur |
| Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan | Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan |
| Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan | Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif |
| Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan | Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif |
| Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial | Jumlah kelompok/kader RW siaga |
| Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan | pembentukan koperasi di tempat ibadah |
| Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan | Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan |
| Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public |

| | |
|---|---|
| Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan | Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap |
| Kegiatan Pembinaan RT RW | Jumlah RT RW mendapatkan pembinaan |
| Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum | Prosentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi bersih |
| Kegiatan Pemeliharaan RTH Kecamatan | luas RTH kecamatan terpelihara |
| Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan | Panjang Drainase terpelihara |
| Kegiatan pengecatan Kerb bahu jalan | Panjang kerb terpelihara |
| Program Pemberdayaan Kewilayahan | Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan |
| Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW | Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW |
| Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK | Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup PKK |
| Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang Taruna | Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna |
| Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM | Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup LPM |

Program Prioritas Tahun 2019- 2023

Adapun yang menjadi Program Prioritas Tahun 2019-2023 adalah Program yang menunjang Tupoksi Kecamatan yaitu program/ kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan Pelayanan Masyarakat yaitu:

1. *Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan*
2. Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

3. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
4. Program yang berkenaan dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yaitu Program Pemberdayaan Kewilayahan.



RENSTRA 2018-2023

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023. IKU, sesuai Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Bojongloa Kidul dengan Pemerintah Kota Bandung, dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKIP tahunan.

Indikator Kinerja Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung diselaraskan dengan seluruh indikator Pemerintah Kota Bandung yang menjadi indikator dari visi Kota Bandung Tahun 2019-2023 yaitu **“Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera Dan Agamis”**.

Adapun Indikator Kinerja Kecamatan Bojongloa Kidul dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan
Bojongloa Kidul
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | |
|---|--------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bojongloa Kidul | Nilai | 80,00 | 80.20 | 80.50 | 80.80 | 81.20 |
| 2. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang di tindaklanjuti tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Persentase kelurahan unggul | % | 50 | 66.66 | 83.33 | 100 | 100 |
| 4. Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan unggul | % | 21.45 | 50 | 65 | 70 | 85 |

Sumber: *Proyeksi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung*



RENSTRA 2018-2023

PENUTUP

BAB 8

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung lima tahun kedepan.

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Bojongloa Kidul sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung, maka rencana strategis Kecamatan Bojongloa Kidul merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.

Dalam Rencana strategis Kecamatan Bojongloa Kidul akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Untuk itu penting untu diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi.

Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:


1. RENSTRA Kecamatan Bojongloa Kidul Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Bandung. Rencana Kerja adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan

kegiatan pembangunan dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. Rencana Kerja Kecamatan Bojongloa Kidul harus konsisten dan sinergis dengan dokumen Renstra Kecamatan Bojongloa Kidul Tahun 2018-2023.

2. Rencana Kerja Perangkat Daerah ini akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Kerja dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) di masing masing pemangku jabatan yang ada dilingkungan Kecamatan.
3. Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja di pemangku jabatan dilingkungan Kecamatan Bojongloa Kidul harus konsisten dengan Renstra Kecamatan Bojongloa Kidul Tahun 2018-2023.
4. RENSTRA Kecamatan Bojongloa Kidul akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa dan untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi.
5. Dalam rangka efektivitas, perubahan RENSTRA Kecamatan Bojongloa Kidul tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung sampai dengan tahun 2023 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul.

Bandung, Desember 2021



CAMAT BOJONGLOA KIDUL,
KECAMATAN
BOJONGLOA
KIDUL
Drs. YUDY HERMAWAN
Pembina Tk I
NIP. 19690501 198910 1 002